

ABSTRAK

EKSISTENSI HASIL AUDIT INVESTIGATIF APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 27/Pis.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)

Oleh

Aafina Ramanda Irfan

Pembuktian tindak pidana korupsi membutuhkan alat bukti salah satunya adalah Hasil Audit yang dilakukan oleh lembaga tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai salah satu lembaga yang berwenang melakukan Audit dalam tindak pidana korupsi. Seperti pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang menjadikan Hasil Audit yang dilakukan oleh APIP sebagai alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimanakah eksistensi hasil audit investigatif APIP sebagai alat bukti tindak pidana korupsi (2) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan terhadap hasil audit APIP dalam perhitungan kerugian keuangan negara (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (3) Bagaimanakah peranan Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap perhitungan temuan kerugian keuangan negara hasil audit investigative.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa eksistensi hasil audit yang dilakukan oleh APIP memiliki eksistensi yang sama dengan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga lain seperti BPK dan BPKP namun ruang lingkup APIP melakukan audit hanya dalam APBDes. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Tjk hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan dikarenakan audit tersebut dilakukan oleh seorang auditor yang juga sebagai ahli yang menerangkan Laporan Hasil Akhir (LHA) pada persidangan sesuai prosedur investigasi untuk tujuan tertentu (Audit Investigatif). Peran Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap perhitungan temuan kerugian keuangan negara hasil audit investigatif dengan membentuk tim untuk melakukan Audit Investigasi mencari segala bentuk informasi mengenai bukti-bukti, catatan-catatan keuangan, dan dokumen. Untuk kemudian Inspektorat Kabupaten Pringsewu akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan APH.

Adapun saran dalam penelitian ini diperlukan kerjasama antara Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan audit investigatif. Auditor juga tetap membutuhkan kolaborasi dengan ahli-ahli lainnya. Kolaborasi apik antara APH, auditor, dan ahli lainnya sangat diperlukan untuk mengungkap setiap dugaan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Hasil Audit, Korupsi, Alat Bukti.

**THE EXISTENCE OF INVESTIGATIVE AUDIT RESULTS FROM
GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISION APPARATUS (APIP)
AS A EVIDENCE IN CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS
(Decision Study Number: 27/Pis.Sus-TPK/t2020/PN.Tjk)**

By

Aafiina Ramanda Irfan

Results of audits conducted by certain institutions as described in the elucidation of Article 32 Paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of corruption crimes Government Internal Supervision Apparatus (APIP) as one of the institutions authorized to conduct audits of corruption crimes. As stated in Decision Number: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk, the audit results conducted by APIP are evidence. This study aims to find out (1) how the existence of APIP investigative audit results is evidence of corruption. (2) What are the considerations of the panel of judges in making decisions regarding APIP audit results in calculating state financial losses? (Decision Study Number: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (3) What is the role of the Pringsewu Regency Inspectorate in calculating the findings of state financial losses as a result of investigative audits?.

This study uses a normative juridical problem approach and an empirical juridical approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data Primary data is obtained from research conducted at field research locations by conducting interviews with informants, while secondary data is obtained from library research results. Furthermore, the data obtained was descriptive and qualitative, and conclusions were drawn.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the existence of audit results conducted by APIP has the same existence as the results of audits carried out by other institutions, such as BPK and BPKP, but the scope of APIP's ability to conduct audits is only in APBDes. In the panel's consideration in Decision Number: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk, the results of an audit conducted by the Pringsewu District Inspectorate were used as documentary evidence in court because the audit was carried out by an auditor who is also an expert who explains the Results Report Final at trial according to investigative procedures for a specific purpose or an investigative audit. The role of the Pringsewu District Inspectorate is to calculate the findings of state financial losses resulting from investigative audits by forming a team to conduct an investigative audit looking for all forms of information regarding evidence, financial records, and documents. The Pringsewu District Inspectorate will then carry out calculations of state financial losses at the request of APH.

In order to carry out investigative audits, cooperation between the Government Internal Supervision Apparatus (APIP) and Law Enforcement Officials is required, according to the study's recommendations. Auditors also still need collaboration with other experts. Slick collaboration between Law Enforcement Officials, auditors, and other experts is needed to uncover any allegations of corruption.

Keywords: Audit Results, Corruption, Evidence